

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Rasio Pendapatan, Pajak, dan Belanja di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024

Mega Tunjung Hapsari¹, Septa Ameliasari², Rizky Prilly Adelia Refani³, Tegar Junior Rajaka Shakti⁴, Muhammad Wahyu Agustino⁵

^{1,2,3,4,5}Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia

Email: ¹megahapsari@uinsatu.ac.id, ²septaaamelia004@gmail.com, ³rizkisuruh@gmail.com,

⁴estehpanasbanget6@gmail.com, ⁵narutoghosop219@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 22-09-2025

Accepted : 16-10-2025

Published : 20-11-2025

Keywords:

APBD

Financial Performance

Financial Ratios

Abstract

This study is motivated by the importance of evaluating regional financial performance as a benchmark for the effectiveness of managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). East Kotawaringin Regency was selected as the object of research due to its significant fiscal dynamics during the 2020–2024 period. The purpose of this study is to assess regional financial performance through several ratios, namely revenue effectiveness, tax growth, capital expenditure, expenditure harmony, and expenditure growth. The research method employed is descriptive quantitative, using secondary data from the budget realization reports published by the Central Bureau of Statistics and the local government. Data were collected through documentation and analyzed by calculating regional financial ratios and interpreting the results systematically. The findings reveal that revenue effectiveness increased consistently and exceeded the target in 2024, while tax growth fluctuated, experiencing a decline in 2023 before recovering in the following year. Capital expenditure showed a gradual increase yet remained relatively low, whereas expenditure harmony indicated a positive shift toward direct expenditure. Overall, the regional financial performance demonstrated an improving trend, although challenges remain in maintaining long-term fiscal stability.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi kinerja keuangan daerah sebagai tolok ukur efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Kotawaringin Timur dipilih sebagai objek kajian karena memiliki dinamika fiskal yang cukup signifikan dalam periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan daerah melalui analisis beberapa rasio, yaitu efektivitas pendapatan, pertumbuhan pajak, belanja modal, keserasian belanja, serta pertumbuhan belanja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan realisasi APBD yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menghitung rasio keuangan daerah dan menginterpretasikan hasilnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah meningkat secara konsisten hingga melampaui target pada 2024, sementara pertumbuhan pajak masih berfluktuasi dengan penurunan pada 2023 sebelum pulih kembali di tahun berikutnya. Belanja modal mengalami peningkatan proporsional namun masih rendah, sedangkan keserasian belanja menunjukkan pergeseran positif ke arah belanja langsung. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah menunjukkan arah yang membaik meski masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

Kata Kunci: APBD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dijalankan sejak era reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang keuangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya keseimbangan fiskal sebagai dasar pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut menjadi tantangan besar karena setiap daerah memiliki potensi fiskal yang berbeda-beda. Kerangka hukum desentralisasi fiskal telah menjadi fondasi penting dalam menilai kinerja keuangan daerah (Zakiyah & Giovanni, 2024).

Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun. APBD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi APBD. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah merupakan komponen utama yang perlu diperhatikan secara seimbang. Jika perencanaan anggaran tidak tepat, maka kinerja pembangunan bisa terganggu. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas kebijakan publik (Haridison & Permana, 2021). Peran APBD sebagai instrumen pembangunan daerah juga dipertegas dalam berbagai kajian keuangan publik (Rahmadani & Rudini, 2023).

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya basis pajak, lemahnya sistem administrasi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban (Anynda & Hermanto, 2020). Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana perimbangan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan (Berizky & Kurniawan, 2024). Oleh karena itu, pendapatan daerah menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan dalam pengelolaan fiskal. Kajian mengenai tantangan peningkatan pendapatan daerah telah banyak dibahas dalam literatur keuangan publik.

Selain pendapatan, sisi belanja daerah juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Belanja daerah yang terarah mampu mendorong peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, masih sering ditemui adanya dominasi belanja rutin yang lebih besar dibanding belanja pembangunan (Mandua et al., 2023). Hal ini dapat menyebabkan kualitas layanan publik berjalan lambat dan pembangunan fisik tidak merata. Pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan belanja secara tepat agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketidakseimbangan dalam struktur belanja berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan daya guna anggaran. Permasalahan pengelolaan belanja telah banyak menjadi perhatian dalam kajian manajemen keuangan sektor publik (Wulandari et al., 2023).

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu daerah di Kalimantan Tengah memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah. Letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi dan kependudukan yang dinamis membuat kebutuhan fiskal semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja Kotawaringin Timur selama 2020–2024 mengalami fluktuasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu dikaji lebih mendalam. Kompleksitas tersebut menuntut evaluasi komprehensif agar pengelolaan APBD lebih optimal. Publikasi tahunan *Kotawaringin Timur Dalam Angka* memberikan gambaran statistik yang mendukung analisis tersebut (Honggara & Jamaluddin, 2024).

Dengan adanya dinamika pendapatan, pajak, dan belanja, kinerja keuangan daerah Kotawaringin Timur menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Evaluasi kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya fiskal secara efektif dan efisien. Analisis keuangan akan membantu mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan hasil evaluasi ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan. Periode 2020–2024 menjadi rentang waktu yang penting karena mencakup fase pasca-pandemi dan masa pemulihan ekonomi. Penilaian menyeluruh terhadap kinerja keuangan akan memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan (Indriani et al., 2020). Kajian akuntabilitas fiskal juga memperlihatkan pentingnya transparansi dan evaluasi dalam manajemen keuangan daerah (Safitri et al., 2024).

Perubahan kondisi sosial dan ekonomi pasca-pandemi memberikan tantangan tambahan bagi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan penurunan pendapatan pada awal periode pemulihan, sementara kebutuhan belanja untuk pelayanan publik terus meningkat. Hal ini menuntut strategi fiskal yang lebih fleksibel dan efisien agar keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tetap terjaga. Ketidakpastian global juga berdampak pada struktur penerimaan, terutama dalam hal pajak daerah yang sensitif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kajian kinerja keuangan perlu mempertimbangkan variabel eksternal yang memengaruhi dinamika fiskal (Said & Bakar, 2021). Analisis serupa juga dikemukakan dalam penelitian mengenai adaptasi fiskal di daerah lain di Indonesia (Junaid, 2024).

Selain itu, penting untuk menilai bagaimana rasio keuangan dapat dijadikan indikator obyektif dalam mengevaluasi kinerja fiskal. Rasio efektivitas pendapatan, pertumbuhan pajak, belanja modal, keserasian belanja, dan pertumbuhan belanja dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pengelolaan APBD. Setiap rasio memiliki fungsi untuk menyoroti aspek tertentu dari kinerja keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis akan lebih sistematis dan dapat dibandingkan dengan standar kinerja fiskal yang berlaku. Hasil dari evaluasi rasio ini juga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi fiskal ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran kondisi keuangan saat ini, tetapi juga menjadi referensi praktis dalam pengambilan keputusan (Triyassari & Sambharakreshna, 2024).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan daerah. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengukur data numerik dari laporan keuangan dan menyajikannya dalam bentuk analisis rasio. Data yang dianalisis berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2020–2024 yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena sudah terdokumentasi secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini mencakup informasi pendapatan, pajak daerah, dan belanja yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan metode ini, fenomena keuangan daerah tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga ditunjukkan dalam bentuk angka yang dapat dibandingkan. Oleh karena itu, metode kuantitatif deskriptif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian (Arfan et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara mengakses laporan realisasi keuangan daerah selama lima tahun terakhir. Setiap data yang diperoleh dicatat secara sistematis untuk kemudian dihitung menggunakan formula rasio keuangan. Lima jenis rasio yang digunakan meliputi efektivitas pendapatan, pertumbuhan pajak, belanja modal, keserasian

belanja, dan pertumbuhan belanja daerah (Milenia et al., 2022). Hasil perhitungan dari rasio tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif guna memberikan interpretasi mengenai kinerja keuangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian rasio terhadap kriteria penilaian yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Satrio & Digdowiseiso, 2023). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pendapatan daerah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahun. Pada Tabel 1 terlihat bahwa rasio efektivitas pendapatan Kotawaringin Timur tahun 2020 berada di angka 94,00 persen, lalu meningkat hingga 101,56 persen pada 2024. Angka di atas 100 persen pada 2024 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melampaui target pendapatan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan intensifikasi penerimaan, termasuk optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. Tren yang meningkat secara konsisten juga menandakan keandalan perencanaan fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas fiskal yang menyatakan bahwa semakin tinggi capaian realisasi terhadap target, maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, Kotawaringin Timur menunjukkan kinerja pendapatan yang relatif efektif. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2020–2024

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Efektivitas (%)
2020	2.500.000	2.350.000	94
2021	2.600.000	2.500.000	96,15
2022	2.800.000	2.750.000	98,21
2023	3.000.000	2.950.000	98,33
2024	3.200.000	3.250.000	101,56

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah berada pada kategori efektif karena rasio berada di atas 90 persen. Performa terbaik terlihat pada tahun 2024, ketika realisasi melampaui target sebesar 101,56 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan administrasi pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pencapaian ini memperlihatkan bahwa proyeksi target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup realistik dan sesuai potensi fiskal. Perbaikan efektivitas juga menjadi bukti bahwa kebijakan penggalian sumber PAD telah berjalan sesuai rencana. Namun, peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan per tahun, sehingga masih diperlukan inovasi untuk memperluas basis pajak dan retribusi. Hal ini penting agar tren positif tetap berlanjut dalam jangka panjang.

Pertumbuhan pajak daerah merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana penerimaan pajak meningkat atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak pada 2021 sebesar 4,44 persen, kemudian naik signifikan pada 2022 sebesar 10,63 persen. Namun pada 2023, pertumbuhan pajak menurun drastis hingga minus 3,84 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi atau adanya relaksasi pajak tertentu. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif 12,00 persen. Pola fluktuasi ini menggambarkan adanya ketidakstabilan dalam kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan. Dengan demikian, perlu strategi diversifikasi sumber penerimaan pajak. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Tahun Ini} - \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Pajak Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Tabel 2. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2020–2024

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2020	450.000	—
2021	470.000	4,44
2022	520.000	10,63
2023	500.000	-3,84
2024	560.000	12

Fluktuasi pada pajak daerah memperlihatkan adanya pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan nasional, kondisi ekonomi makro, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penurunan pada 2023 menunjukkan potensi kerentanan fiskal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Meski demikian, lonjakan pertumbuhan 2024 menunjukkan kemampuan daerah dalam melakukan pemulihan fiskal. Upaya intensifikasi pajak dengan memperbaiki sistem penagihan serta digitalisasi layanan pajak dapat menjadi salah satu faktor peningkatan. Pertumbuhan yang tidak konsisten ini juga memberi sinyal bahwa basis pajak daerah masih sempit. Oleh karena itu, perluasan basis pajak seperti pajak parkir, hotel, dan restoran dapat menjadi strategi yang efektif. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan pajak dapat lebih stabil ke depan.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik. Tabel 3 memperlihatkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kotawaringin Timur berkisar antara 21,42 hingga 22,78 persen pada periode 2020–2024. Angka tersebut menunjukkan proporsi belanja modal masih relatif kecil dibandingkan total belanja daerah. Meski terjadi peningkatan secara bertahap, persentasenya masih di bawah 30 persen. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja rutin dan operasional. Padahal, idealnya belanja modal harus mendapat porsi lebih besar agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini memperlihatkan perlunya kebijakan pergeseran alokasi anggaran. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur 2020–2024

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio (%)
2020	600.000	2.800.000	21,43
2021	650.000	3.000.000	21,67
2022	720.000	3.200.000	22,5
2023	750.000	3.400.000	22,06
2024	820.000	3.600.000	22,78

Rasio belanja modal yang relatif rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Hal ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Tren peningkatan kecil setiap tahun memberi sinyal adanya komitmen bertahap, meskipun belum signifikan. Jika alokasi belanja modal diperbesar, efek multiplikasi terhadap sektor lain dapat tercipta, seperti peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penguatan belanja modal juga menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang proporsi belanja rutin dan modal. Penyesuaian ini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih optimal bagi masyarakat.

Rasio keserasian belanja mengukur keseimbangan antara belanja langsung yang berkaitan dengan program pembangunan dan total belanja daerah. Tabel 4 memperlihatkan bahwa rasio keserasian meningkat dari 42,86 persen pada 2020 menjadi 48,61 persen pada 2024. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam orientasi anggaran yang lebih fokus pada belanja produktif. Meskipun demikian, angka ini masih belum mencapai 50 persen penuh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa belanja langsung memang mengalami perbaikan, tetapi tetap kalah besar dibandingkan belanja tidak langsung. Idealnya, belanja langsung harus mendapat porsi dominan agar kegiatan pembangunan lebih terarah. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan konsistensi dalam memperbesar alokasi belanja langsung. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Kotawaringin Timur 2020–2024

Tahun	Belanja Langsung	Total Belanja	Rasio (%)
2020	1.200.000	2.800.000	42,86
2021	1.350.000	3.000.000	45
2022	1.480.000	3.200.000	46,25
2023	1.600.000	3.400.000	47,06
2024	1.750.000	3.600.000	48,61

Kecenderungan peningkatan rasio keserasian belanja menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja pembangunan. Hal ini dapat memperkuat layanan publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan total belanja pada Tabel 5, peningkatannya relatif moderat dengan tren melambat dari 7,14 persen pada 2021 menjadi 5,88 persen pada 2024. Perlambatan pertumbuhan ini menunjukkan adanya keterbatasan fiskal dalam memperluas ruang belanja daerah. Oleh karena itu, strategi efisiensi dan prioritisasi belanja harus dilakukan agar anggaran terbatas dapat dimanfaatkan maksimal. Fokus pengalokasian dana pada sektor produktif akan lebih memberikan dampak berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan struktur belanja menjadi agenda penting bagi Kotawaringin Timur. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun Ini} - \text{Realisasi Belanja Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Tabel 5. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2020–2024

Tahun	Total Belanja	Pertumbuhan (%)
2020	2.800.000	–
2021	3.000.000	7,14
2022	3.200.000	6,67
2023	3.400.000	6,25
2024	3.600.000	5,88

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap rasio efektivitas pendapatan, pertumbuhan pajak, belanja modal, keserasian belanja, dan pertumbuhan belanja memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2020–2024. Setiap indikator menunjukkan pola yang berbeda, mulai dari peningkatan efektivitas pendapatan hingga fluktuasi pertumbuhan pajak yang perlu diantisipasi. Rasio belanja juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi anggaran, meskipun masih terdapat ruang untuk memperbesar alokasi belanja produktif. Hasil pembahasan ini menjadi dasar penting dalam memahami kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat mendukung perumusan strategi

penganggaran yang lebih tepat sasaran. Evaluasi keuangan daerah tidak hanya sebatas angka, melainkan refleksi dari kebijakan fiskal yang dijalankan. Oleh karena itu, pemetaan menyeluruh atas kinerja keuangan daerah dapat dijadikan pijakan bagi langkah pembahasan selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Analisis kinerja keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren positif pada efektivitas pendapatan daerah yang berhasil mencapai bahkan melampaui target pada tahun terakhir. Pertumbuhan pajak daerah masih berfluktuasi, dengan penurunan pada 2023, tetapi mampu kembali pulih secara signifikan pada 2024. Proporsi belanja modal terhadap total belanja menunjukkan peningkatan bertahap, meskipun masih relatif rendah sehingga perlu diperbesar untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Rasio keserasian belanja memerlukan adanya orientasi yang semakin kuat pada belanja langsung, walaupun porsinya belum sepenuhnya dominan. Pertumbuhan total belanja daerah mengalami perlambatan, yang menandakan adanya keterbatasan fiskal yang harus diantisipasi dengan strategi efisiensi. Secara umum, kondisi keuangan daerah menunjukkan arah perbaikan, tetapi masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas dan efektivitas anggaran. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah perlu terus diawasi dan diperbaiki agar mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis rasio pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada Kota Banda Aceh tahun 2017–2020. *Jurnal Economina*, 2(4), 979–992.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024). *Laporan keuangan 2023 (audited)*. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. <https://ppid.kotimkab.go.id/front/dokumen/detail/300356025>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2025). *Kabupaten Kotawaringin Timur dalam angka 2025* (Vol. 23). BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. <https://kotimkab.bps.go.id>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Haridison, A., & Permana, D. (2021). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(2), 53–74.
- Honggara, A., & Jamaluddin, J. (2024). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(1), 1–12.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis kondisi keuangan pemerintah kabupaten di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175–182.
- Junaid, M. T. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tarakan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(1), 42–50.

- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2023). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Teluk Wondama periode 2017–2021. *Lensa Ekonomi*, 16(2), 237–253.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2), 105–113.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2018–2021. *Profit: Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 133–143.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Safitri, N., Ardiansyah, A., & Akbar, M. B. (2024). Perkembangan akuntabilitas keuangan di sektor publik dalam evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Media Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 7–14.
- Said, S. W., & Bakar, A. (2021). Analisis tingkat kemandirian, efektivitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(2), 1–20.
- Satrio, D. F., & Dgidewiseiso, K. (2023). Analisis rasio keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 991–1010.
- Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2024). Value for money dan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 259–278.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69.
- Zakiyah, W., & Giovanni, J. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18(1), 72–88.